

Survei
Penilaian
Integritas



BUKU SAKU HASIL
2017





Survei
Penilaian
Integritas
Buku Saku Hasil
2017

Daftar Isi

Pendahuluan	3
Ruang Lingkup	5
Kerangka Penilaian	10
Hasil Survei	15
Kesimpulan	26
Rekomendasi	29

Latar Belakang

Korupsi menjadi masalah yang dialami hampir semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Korupsi dianggap sebagai masalah yang dapat membahayakan kemajuan bangsa karena menurunkan kesejahteraan rakyat. Korupsi juga akan menimbulkan efek jangka panjang pada generasi muda masyarakat Indonesia. Jika tidak ditangani secara cepat, hal ini dapat merugikan negara dari sisi ekonomi. Namun saat ini kesadaran melawan korupsi telah menjadi “trend” dunia, seiring dengan semakin banyaknya peraturan yang dibuat untuk mencegah terjadinya korupsi. Indonesia juga melakukan bentuk pencegahan mengenai tindak korupsi, termasuk dengan pembuatan peraturan dan pembentukan KPK.

Salah satu akar permasalahan korupsi adalah karena rendahnya integritas baik di tingkat organisasi maupun individu. Integritas menjadi hal yang perlu ditanamkan sejak dini untuk mencegah korupsi. Tanpa perbaikan pada integritas, sebaik apapun sistem akan selalu muncul kolusi. Kehadiran integritas di tingkat individu, organisasi dan nasional merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya korupsi. Di Indonesia upaya tersebut sudah muncul, diinisiasi oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, dibutuhkan perangkat yang mampu membantu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memetakan persoalan integritas, mengembangkan program pencegahan dan penindakan, serta mengukur keberhasilan strategi pencegahan korupsi. Maka dari itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI 2017 bertujuan untuk mengukur tingkat korupsi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia



Tujuan

Secara umum, kegiatan SPI 2017 bertujuan untuk memetakan kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan korupsi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menjadi target kegiatan pencegahan korupsi oleh KPK. Tujuan dari diadakannya SPI adalah:

1. Menyajikan indeks integritas pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Menyajikan gambaran umum permasalahan integritas yang dihadapi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Manfaat

Manfaat dari hasil kegiatan SPI 2017 ini antara lain:

1. Perangkat untuk mengidentifikasi prioritas area perbaikan yang rentan terhadap korupsi, sebagai dasar perbaikan program pencegahan korupsi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
2. Memberikan capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas antikorupsi yang sudah dilakukan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan meningkatkan kepercayaan (*trust*) publik pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah secara umum.

Target Lembaga

SPI 2017 dilaksanakan pada 36 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan target sampel pada setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebanyak 130 responden yang terdiri dari 60 responden internal, 60 responden eksternal dan 10 (sepuluh) responden eksper. Terdapat 6 (enam) Kementerian/lembaga, 15 (lima belas) pemerintah provinsi, dan 15 (lima belas) pemerintah kabupaten/kota yang tercakup dalam survei ini

Kementerian/Lembaga

1. Mahkamah Agung
2. Kepolisian RI
3. Kementerian Kesehatan
4. Kementerian Perhubungan
5. Kementerian Keuangan (DJBC)
6. Badan Pertahanan Nasional

13. Provinsi Maluku Utara
14. Provinsi Papua Barat
15. Provinsi Papua

Pemerintah Provinsi

1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Bengkulu
7. Provinsi Kepulauan Riau
8. Provinsi Jawa Barat
9. Provinsi Banten
10. Provinsi Nusa Tenggara Timur
11. Provinsi Kalimantan Tengah
12. Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah Kabupaten/ Kota

1. Kota Banda Aceh
2. Kabupaten Deli Serdang
3. Kota Padang
4. Kota Pekanbaru
5. Kota Bengkulu
6. Kabupaten Klaten
7. Kota Madiun
8. Kota Tangerang
9. Kabupaten Badung
10. Kota Mataram
11. Kota Palangkaraya
12. Kota Banjarmasin
13. Kota Samarinda
14. Kota Palu
15. Kota Makassar

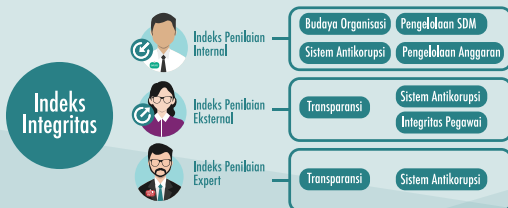
Kerangka Penilaian Integritas

Dalam SPI 2017, integritas adalah suatu penilaian dengan menggunakan kombinasi pendekatan persepsi dan pengalaman (langsung maupun tidak langsung) mengenai bagaimana Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diwakili pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas melakukannya secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi.

Penilaian internal yang dilakukan oleh para pegawai mencakup sisi budaya organisasi, keberadaan sistem antikorupsi, pengelolaan SDM dan pengelolaan anggaran. Keterlibatan pengguna layanan atau eksternal juga dibutuhkan untuk memberikan penilaian berdasarkan pengalaman mereka berinteraksi dengan institusi tertentu. Penilaian yang diberikan oleh para pengguna layanan perlu mencakup transparansi, keberadaan sistem antikorupsi, dan penilaian terhadap integritas pegawai secara umum.

Sedangkan pada sisi lain, penilaian eksper atau narasumber ahli dibutuhkan untuk mengungkapkan permasalahan integritas pada institusi secara komprehensif.

Kerangka Kerja Pengukuran Integritas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah



Metode Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan KPK dalam pengumpulan data ditentukan berdasarkan lokus survei dan target sampel seperti berikut:

Lokus Survei

- Kementerian/Lembaga
Unit kerja setara eselon II yang memberikan pelayanan publik tertentu yang menjadi fokus perhatian KPK
- Pemerintah Daerah,
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)

Target Sampel

60

responden
internal

60

responden
eksternal

10

responden
ekspert

Pemilihan sampel dilakukan kepada tiga stakeholders yang terkait dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan hal berikut:

Pemilihan Sampel Internal

ASN yang telah bekerja minimal 1 tahun. Kuota sampel disebar secara proporsional dengan ketentuan berikut:

- Jabatan Eselon II atau setingkat dipilih semua sebagai sampel
- Jabatan Eselon III & IV dan Staf dipilih sampel secara proporsional

Pemilihan Sampel Eksternal

Responden eksternal dibedakan menjadi responden berdasarkan:

Pelayanan Loker

- Pengguna layanan yang sudah pernah akses layanan loket sampai selesai dalam 12 bulan terakhir
- Sampel diambil sedemikian rupa sesuai kedatangan responden di setiap loket sampai terpenuhi target

Pelayanan Non Loker

- Pemilihan responden stakeholder ditentukan secara sistematis dengan menggunakan daftar pengguna layanan (*customer list*)

Pemilihan Sampel Eksper

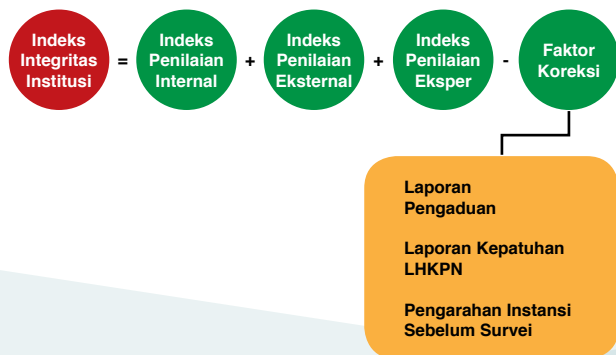
Survei Eksper ini dilakukan dengan wawancara kepada beberapa orang yang memiliki pengetahuan komprehensif terhadap masalah integritas, korupsi dan lain-lain terkait lokus survei. Jumlah sampel eksper untuk masing-masing lokus telah ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) orang yang pemilihannya diserahkan pada masing-masing daerah.

Berikut adalah kriteria ahli/tokoh yang dapat dijadikan sampel eksper:

- I. Akademisi bidang pemerintah atau politik FISIP di universitas lokal yang terbesar (akademisi yang memiliki reputasi terhadap pemerintah);
- II. Jurnalis (pemerhati kinerja instansi) dari Koran lokal terbesar (jurnalis memiliki reputasi terhadap pemerintah);
- III. DPR/DPRD komisi bidang pemerintah (anggota DPR/DPRD berasal dari partai oposisi);
- IV. Inspektorat atau pengawas internal, Auditor BPK/BPKP provinsi;
- V. Ombudsman;
- VI. Pensiunan (pejabat eselon II);
- VII. LSM yang fokus pada kinerja pemerintah daerah atau antikorupsi;
- VIII. Kepala instansi/perwakilan kepala instansi;
- IX. Tokoh masyarakat yang fokus pada kinerja instansi;
- X. Asosiasi stakeholder terkait (misal: pengusaha, profesi, dsb).

Skema Perhitungan Indeks Integritas

Cara menghitung Indeks Integritas adalah dengan menggabungkan indeks yang diperoleh dari tiga aspek, yaitu indeks penilaian internal, indeks penilaian eksternal, dan indeks penilaian eksper. Indeks penilaian Internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas organisasi. Indeks penilaian Eksternal dihitung berdasarkan penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Indeks penilaian Ekspert dihitung berdasarkan penilaian beberapa narasumber atau eksper yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait permasalahan integritas dan korupsi pada Kementerian atau Pemerintah Daerah tertentu. Penghitungan indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksi sebagai dimensi dalam pembentukan Indeks Integritas. Faktor Koreksi berperan sebagai penyeimbang indeks yang dihasilkan dari indeks penilaian internal, eksternal dan eksper dengan kondisi riil integritas Kementerian atau Pemerintah Daerah



Variabel Indeks Penilaian Internal

Terdapat 33 variabel yang membentuk keempat dimensi penilaian internal, yang meliputi:

1. Budaya organisasi, mencakup adanya transparansi, pemanfaatan fasilitas pekerjaan untuk kepentingan pribadi, keberadaan calo/perantara/biro jasa, korupsi kolusi dan nepotisme dalam menjalankan tugas, serta perintah atasan yang menyalahi aturan;
2. Sistem antikorupsi, yang mencakup adanya kegiatan sosialisasi antikorupsi, sanksi bagi para pelaku korupsi, suasana yang aman bagi pelapor praktik korupsi, dan keteladanan antikorupsi dari pimpinan;
3. Pengelolaan SDM, yang mencakup hal-hal negatif dalam seleksi penerimaan pegawai dan praktik KKN dalam peningkatan karir pegawai;
4. Pengelolaan anggaran, yang mencakup penyelewengan anggaran, perjalanan dinas, pemotongan honor/transport lokal maupun perjalanan dinas.



Variabel Indeks Penilaian Eksternal

Indeks Penilaian Eksternal tersusun atas 3 (tiga) dimensi yaitu transparansi, sistem antikorupsi dan integritas pegawai. Ketiga variabel tersebut terbentuk dari 16 (enam belas) variabel, yaitu:

- 1. Transparansi**, meliputi adanya transparansi, ketaatan pada prosedur layanan, dan bebas dari pengistimewaan kelompok tertentu;
- 2. Sistem antikorupsi**, meliputi adanya kampanye antikorupsi, sistem pencegahan korupsi yang efektif, pemberian hukuman setimpal pada pelaku korupsi, mekanisme pelaporan korupsi, dan responsif pada laporan korupsi;
- 3. Integritas pegawai**, meliputi budaya kejujuran pegawai, bebas dari kepentingan pribadi, bebas dari penyalahgunaan wewenang, pelayanan yang baik, dan bebas dari penerimaan suap.

Variabel Indeks Penilaian Ekspert

Indeks Penilaian Ekspert tersusun atas 2 (dua) dimensi, yang meliputi sistem antikorupsi dan transparansi di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Variabel Faktor Koreksi

Indeks dari faktor koreksi akan diambil berdasarkan 3 (tiga) jenis laporan yang digunakan untuk faktor koreksi, antara lain:

1. Laporan Pengaduan

Laporan Pengaduan yang digunakan dalam perhitungan indeks tahun 2017 pada 36 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, digunakan laporan pengaduan yang diterima KPK selama tahun 2016.

2. Laporan Kepatuhan

Laporan kepatuhan LHKPN adalah persentase dari jumlah wajib lapor di setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang belum melaporkan LHKPN terhadap jumlah seluruh wajib lapor tahun sebelumnya.

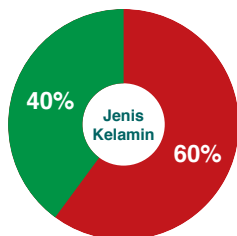
3. Pengarahan Sebelum Survei Dilaksanakan

Pengarahan yang dimaksud disini adalah adanya upaya mengarahkan responden untuk memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan (lebih baik/ lebih buruk) ketika mengisi kuesioner.

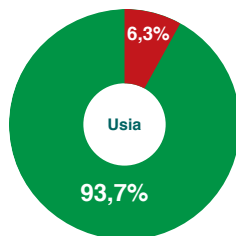


Hasil Survei

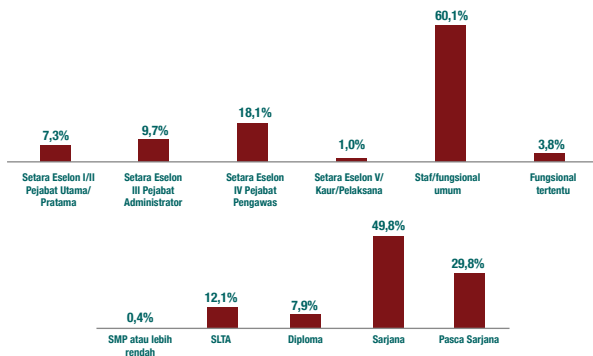
Profil Responden Internal SPI 2017



■ Laki-laki ■ Perempuan



■ <30 ■ >30

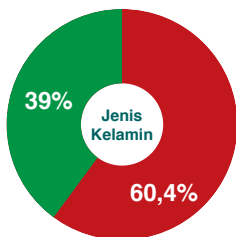


N=2084

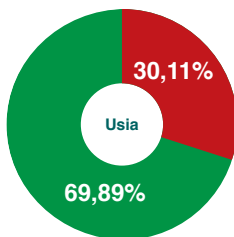
Responden Internal didominasi oleh staf/fungsional umum (60.1%) di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan usia lebih dari 30 tahun (93.7%). Pendidikan terakhir responden mayoritas adalah sarjana (49.8%).

Hasil Survei

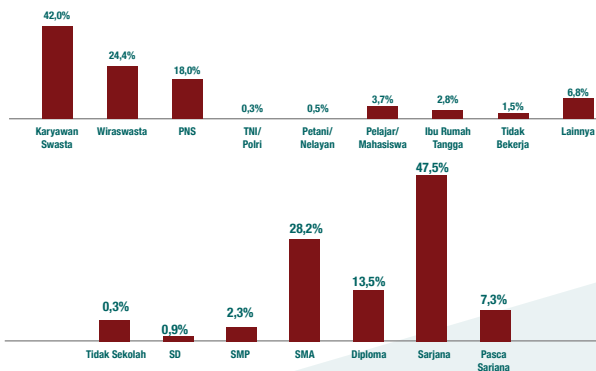
Profil Responden Eksternal SPI 2017



■ Laki-laki ■ Perempuan



■ <30 ■ >30

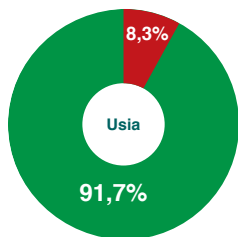


N=2142

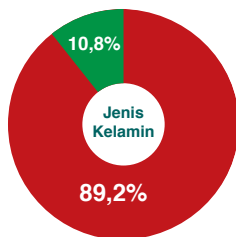
Responden Eksternal didominasi oleh laki-laki dibandingkan wanita (60.4%). Karyawan swasta merupakan responden yang mendominasi responden eksternal (42%). Responden eksternal juga didominasi oleh responden dengan pendidikan terakhir sarjana (47.5%).

Hasil Survei

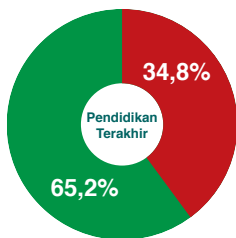
Profil Responden Ekspert SPI 2017



■ <30 ■ >30



■ Laki-laki ■ Perempuan



■ <=S1 ■ >S1

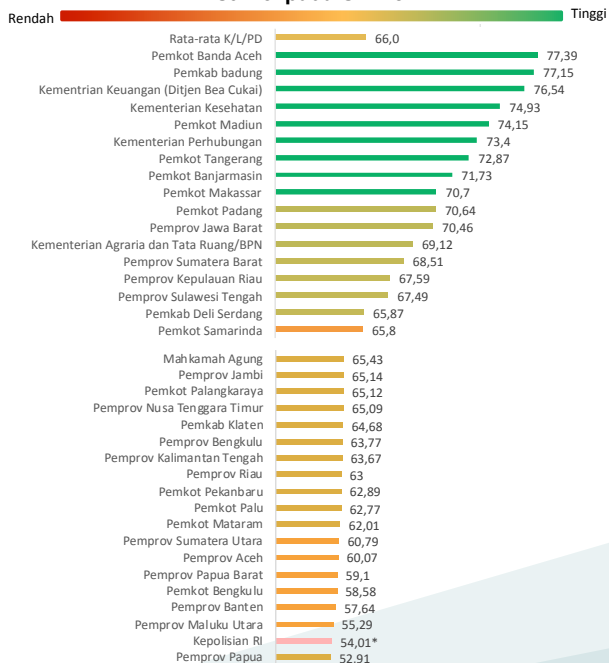
N=204

Responden Ekspert pada 36 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah didominasi oleh pria (89.2%). Selain itu, responden ekspert juga didominasi oleh responden berusia lebih dari 30 tahun (91.7%) dan responden yang memiliki pendidikan terakhir minimal Sarjana (65.2%).

Hasil Survei

Hasil SPI 2017

Indeks Penilaian Integritas di 36 Lembaga yang Disurvei pada SPI 2017



Pemerintah Kota Banda Aceh memperoleh indeks integritas tertinggi dan Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan Nilai Terendah pada tahun 2017;

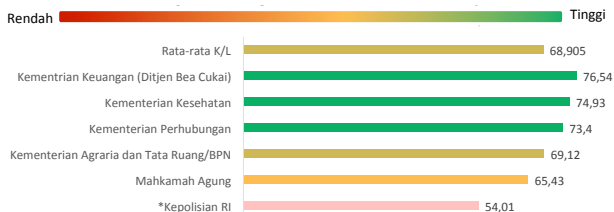
1. Pengalaman melihat/dan mendengar korupsi muncul disemua organisasi peserta survei. Hal ini menandakan bahwa kejadian Korupsi merupakan risiko semua lembaga;
2. Nilai Indeks tinggi mendekati 100 menunjukkan risiko korupsi rendah dan adanya kemampuan sistem untuk merespon kejadian korupsi dan pencegahannya secara lebih baik.
3. Nilai tinggi tidak berarti kejadian korupsi tidak akan terjadi karena korupsi sebagaimana tindak pidana lain dapat terjadi meski dalam sistem yang sudah mapan sekali pun.

*Survei terhadap Internal (Pegawai) Kepolisian RI tidak dilakukan.

Hasil Survei

Hasil SPI 2017

Indeks dari 6 (Enam) Kementerian yang menjadi lokus survei pada SPI 2017



1. Kementerian Keuangan diwakili oleh Ditjen Bea Cukai mendapatkan nilai tertinggi dari 6 peserta untuk kategori kementerian/lembaga;
2. Nilai indeks ini merupakan nilai gabungan/komposit untuk menggambarkan kondisi sistem antikorupsi, budaya organisasi, Pengelolaan anggaran, dan pengelolaan SDM.

*Survei terhadap Internal (Pegawai) Kepolisian RI tidak dilakukan.



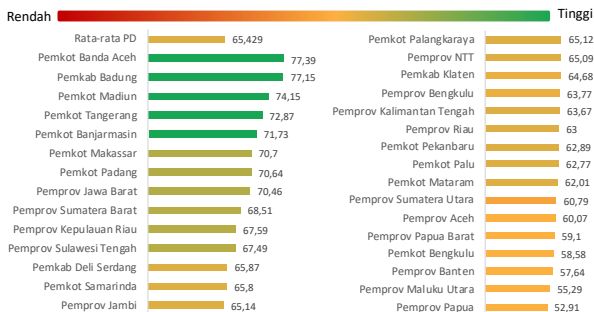
Sedikitnya jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi belum dapat menggambarkan kondisi Kementerian / Lembaga di Indonesia secara keseluruhan. Namun hal ini dapat mengindikasikan tingkat integritas dari Kementerian di Indonesia yang diragukan. Ke depan diharapkan partisipasi Kementerian / Lembaga dapat lebih banyak sehingga dapat lebih mencerminkan kondisi yang ada.



Hasil Survei

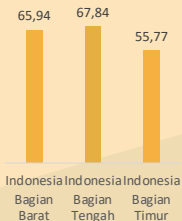
Hasil SPI 2017

Indeks Penilaian Integritas 30 (Tiga Puluh) Pemerintah Daerah pada SPI 2017



1. Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Badung mendapatkan nilai pertama dan kedua tertinggi kategori Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten);
2. Terdapat perbedaan angka partisipasi dan indeks integritas antara Pemerintah Daerah bagian barat, tengah dan timur dengan kecenderungan yang lebih rendah untuk Indonesia bagian timur.

Indeks Integritas
Pemerintah Daerah
Berdasarkan Wilayah



Cukup besarnya angka partisipasi dari Pemerintah Daerah dapat menggambarkan tingkat integritas pemerintah daerah di Indonesia. Walaupun partisipasi Pemerintah Provinsi / Daerah lebih tinggi daripada Kementerian, namun jumlahnya baru sebanyak 30 dari ratusan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota di Indonesia. Ke depan diharapkan jumlah pemerintah daerah yang berpartisipasi dapat lebih banyak dan terus bertambah sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih mencerminkan kondisi yang ada.

Hasil Survei

Hasil SPI 2017



Budaya Organisasi

Tahukah Anda bahwa:

1. 17% pegawai melihat / mendengar keberadaan perantara di instansi (unit kerja).;
2. Keberadaan Perantara muncul di semua (35/35) instansi yang mengikuti SPI 2017;
3. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena calo/perantara masih merupakan hal yang umum dalam layanan publik.

Tahukah Anda bahwa:

1. 1 dari 10 pegawai melihat/ mendengar rekannya menerima suap/gratifikasi;
2. 3 dari 10 Pengguna Layanan melihat/ mendengar pegawai instansi menerima suap/ Gratifikasi;
3. Kesaksian penerimaan Suap/ Gratifikasi muncul di semua instansi peserta di SPI 2017;
4. Hal ini menandakan bahwa risiko korupsi dapat terjadi di semua lembaga.



Sistem Antikorupsi

Tahukah Anda bahwa:

1. 8% Responden pegawai menyatakan masih ada pegawai yang melakukan korupsi namun tidak ditindak;
2. 2 dari 10 pengguna layanan cenderung tidak percaya bahwa pegawai yang melakukan korupsi akan mendapatkan hukum sesuai aturan yang ada;
3. Hal ini terjadi di 40% instansi peserta SPI 2017;
4. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan pelanggaran korupsi di lembaga masih menjadi isu yang harus diselesaikan.

Tahukah Anda bahwa:

1. 22% Pegawai cenderung tidak percaya pelapor praktik korupsi tidak akan dihambat karirnya, tidak akan dikucilkan dan tidak diberi sanksi;
2. 2 dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja pada dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat, dan sejenisnya dalam 12 bulan terakhir;
3. Hal ini mengindikasikan masih adanya kejadian pegawai yang tidak dilindungi bahkan dihukum ketika melaporkan korupsi di instansinya.

Hasil Survei

Hasil SPI 2017



Pengelolaan SDM

Tahukah Anda bahwa:

1. 30% Pegawai cenderung percaya bahwa suap/gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di instansinya;
2. Masih ada pegawai yang melihat/mendengar rekan kerja memberikan suap/gratifikasi untuk mempengaruhi kebijakan karir (4%);
3. Suap/Gratifikasi kebijakan karir muncul di 82 % (29/35) instansi peserta SPI 2017;
4. Korupsi dalam pengelolaan SDM masih menjadi tantangan dalam menciptakan birokrasi yang bersih di Indonesia.



Pengelolaan Anggaran

Tahukah Anda bahwa:

1. 17% Pegawai percaya bahwa terjadi penggelembungan anggaran di instansinya;
2. Masih terdapat responden yang pernah mendengar atau melihat keberadaan penyelewengan anggaran (5,90%);
3. Risiko muncul di 80% Instansi Peserta Survei;
4. Hal ini mengindikasikan kebutuhan untuk mendorong pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan anggaran sebagai salah satu fokus utama pencegahan korupsi.

Hasil Survei

Hasil SPI 2017



Transparansi

Tahukah Anda bahwa:

1. 2 dari 10 pengguna layanan mengatakan dirinya cenderung percaya bahwa ada pegawai yang memberikan perlakuan khusus yang tidak sesuai aturan;
2. 4 dari 10 pengguna layanan cenderung percaya bahwa suku, agama, dan alamater berpengaruh ketika memproses perizinan atau memberi pelayanan;
3. 88% Percaya bahwa petugas layanan telah memberikan upaya terbaik dalam memproses perizinan;
4. Secara umum hasil survei menunjukkan bahwa persepsi pengguna terkait transparansi cukup baik meski demikian masih terdapat isu ketidakadilan layanan ketika memproses perizinan atau memberi layanan yang perlu diperhatikan.



Integritas Pegawai

Tahukah Anda bahwa:

1. 24% pengguna layanan cenderung tidak percaya bahwa pegawai instansi telah menjunjung tinggi kejujuran dan terbebas dari kepentingan pribadi;
2. Masih terdapat pengguna layanan yang pernah dimintai uang pada saat menerima layanan (7%), hal ini muncul di 88% instansi Peserta di 2017 (32/36);
3. Walaupun dilakukan oleh oknum (sebagian kecil) pegawai, kejadian ini berdampak besar pada pembentukan persepsi korupsi pada layanan publik dan citra lembaga dimata publik.

Hasil Survei

Perbandingan SPI 2016 dan 2017

2016

2017

Ruang Lingkup

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2016 mencakup 64 K/L/PD (Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah) di Indonesia.

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2017 mencakup 36 K/L/PD (Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah) di Indonesia.

Cakupan Sampel

K/L (Kementerian/Lembaga) hanya mencakup layanan tertentu. Sementara Pemerintah Daerah mencakup 6 (enam) dinas.

K/L mencakup unit kerja setara eselon II yang memberikan pelayanan publik tertentu. Sementara Pemerintah Daerah mencakup 6 (enam) dinas.

Responden

Responden untuk tiap instansi adalah 60 responden internal dan 60 responden eksternal.

Responden untuk tiap instansi adalah 60 responden internal, 60 responden eksternal, dan 10 responden eksper.

Variabel Penilaian

Variabel terbagi menjadi Indeks Penilaian Internal dan Indeks Penilaian Eksternal.

Variabel terbagi menjadi Indeks Penilaian Internal, Indeks Penilaian Eksternal, dan Indeks Penilaian Eksper.



Karena terdapat beberapa perbedaan dari SPI 2016 dan SPI 2017, maka hal yang dapat dibandingkan adalah angka kejadian dan bukan indeksinya.

Hasil Survei

Perbandingan Hasil SPI 2016 dan 2017



Budaya Organisasi

Tahukah Anda bahwa:

- Pada tahun 2016 masih ada sekitar 16% pegawai melihat/mendengar keberadaan calo pada proses pelayanan di instansi. Pada tahun 2017 hal serupa masih saja terjadi, setidaknya 17% pegawai mengatakan bahwa pernah mengetahui adanya calo/perantara/biro jasa yang mengurus di unit kerja instansi.
- Selain itu, pada tahun 2016 juga terdapat pegawai yang melihat adanya penerimaan suap/gratifikasi berupa barang atau fasilitas dalam 12 bulan terakhir (9%). Pada tahun 2017 ditemukan setidaknya 1 dari 10 pegawai yang percaya masih ada gratifikasi pada unit kerja instansinya.



Sistem Antikorupsi

Tahukah Anda bahwa:

- Pada tahun 2016 terdapat minimal 15% pegawai mengatakan pernah melihat/mendengar pelaku korupsi terungkap dalam 12 bulan terakhir. Bahkan 72% melihat pelaku korupsi diproses secara hukum dalam 12 bulan terakhir. Sementara di tahun 2017 angka ini mengalami perbaikan dimana terdapat 8% pegawai yang pernah mendengar setidaknya satu kali pelaku korupsi terungkap dalam satu tahun terakhir dan 65% pegawai melihat setidaknya satu kali pelaku korupsi diproses secara hukum.



Meskipun terjadi perbaikan pada aspek sistem antikorupsi yang diindikasikan dengan menurunnya kasus korupsi yang terungkap dan diproses hukum. Namun di aspek budaya organisasi, keberadaan calo dan gratifikasi masih muncul dengan persentase yang tidak jauh berbeda. Begitu pula dengan fenomena suap dan gratifikasi. Hal ini mengindikasikan belum berubahnya situasi korupsi pada sebagian besar instansi peserta survei. Diperlukan langkah-langkah pencegahan kongkrit dan segera untuk memastikan perubahan terjadi.



Integritas Pegawai

Tahukah Anda bahwa:

- Pada tahun 2016 masih ada responden yang mengatakan bahwa masih terdapat pelanggaran aturan di instansi, seperti diminta uang ('administrasi', 'transport', 'rokok', 'kopi', dll) di luar ketentuan saat berurusan dengan pegawai (5%). Di tahun 2017, angka pelanggaran peraturan bertambah menjadi sekitar 6%



Pengelolaan SDM

Tahukah Anda bahwa:

- Di tahun 2016, setidaknya 1 dari 10 pegawai pernah melihat adanya keistimewaan yang diterima seseorang saat seleksi penerimaan pegawai. Meningkat di tahun 2017, minimal 15% pegawai percaya bahwa pada penerimaan pegawai honorer dan peningkatan jabatan dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, kesamaan almamater, suap, dan gratifikasi.



Pengelolaan Anggaran

Tahukah Anda bahwa:

- Pada tahun 2016 masih terdapat pegawai yang percaya adanya perjalanan dinas fiktif/kwitansi fiktif/biaya transportasi fiktif dalam 12 bulan terakhir (7%). Di tahun 2017, angka penyelewengan perjalanan dinas ini meningkat (10%)



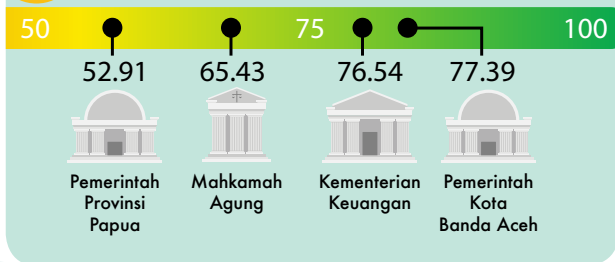
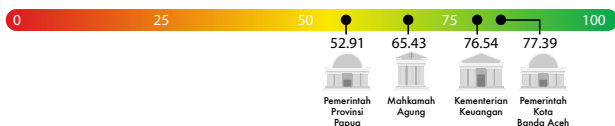
Sejak 2016, masyarakat sebagai pengguna layanan masih menemukan adanya permintaan uang administrasi, rokok, kopi, dll diluar ketentuan oleh pegawai instansi. Selain itu, nepotisme dan penyelewengan anggaran juga masih terjadi. Hal ini menunjukkan belum adanya perubahan dalam layanan maupun bagaimana pegawai melaksanakan tugasnya meski beberapa alternatif upaya telah dilakukan oleh instansi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan kepada pihak internal, eksternal, dan eksper, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

Hasil Indeks integritas SPI 2017 untuk Kementerian/Lembaga mempunyai rentang 65,43-76,54 sedangkan untuk Pemerintah Daerah sebesar 52,91-77,39 dari skala interval 0-100.

Dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menjadi lokus SPI 2017, Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki Indeks Integritas yang tertinggi (77.39) dan Pemerintah Provinsi Papua memiliki Indeks Integritas yang terendah (52.91).



Kesimpulan

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan kepada pihak internal, eksternal, dan eksper, dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

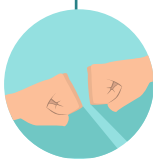


Kesimpulan

Survei Penilaian Integritas dari pihak Eksternal menyimpulkan masih terjadi permasalahan pada aspek transparansi, sistem antikorupsi dan integritas pegawai.



Pemberian perlakuan khusus yang tidak sesuai aturan berdasarkan kedekatan, suku, atau almamater



Ketidakpercayaan pada tindak lanjut pada pelaku atau pelapor korupsi



Belum tercapainya pegawai yang menjunjung tinggi kejujuran dan kebebasan dari kepentingan pribadi

Kesimpulan

Sejak tahun 2016, baik masyarakat sebagai pengguna layanan ataupun pegawai K/L/PD masih melihat atau mendengar terjadinya pelanggaran terkait korupsi. Hingga tahun 2017 ini ditemukan masalah-masalah serupa dengan tahun 2016.



**Keberadaan
Calo**



Gratifikasi



**Buruknya
Sistem
Antikorupsi**



**Nepotisme
Pengelolaan
SDM**



**Penyelewangan
Anggaran**

Rekomendasi



Berdasarkan permasalahan yang terjadi, berikut beberapa rekomendasi yang diusulkan kepada K/L/PD terkait:

Perbaiki budaya organisasi melalui

- Pengelolaan benturan kepentingan dan penguatan kode etik dengan cara memperkuat aturan dan implementasi pengelolaan konflik kepentingan dan kode etik di institusi. Pendekatan ini dilakukan untuk mendorong berperilaku tidak saja sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari itu, yaitu bertindak berdasarkan standar etika yang telah ditetapkan oleh institusi. Cakupan yang diatur tidak saja pada saat pemberian layanan tetapi mencakup proses internal seperti promosi dan mutasi dan proses internal lainnya seperti pengadaan barang dan jasa.
- Mengurangi peran perantara. Inisiatif untuk mengurangi peran perantara dalam layanan dapat menggunakan teknologi dalam bentuk layanan online, akses informasi, deregulasi aturan dan pemangkasan birokrasi yang menghambat dan tidak diperlukan dalam layanan.
- Peningkatan kesadaran risiko korupsi di tingkat organisasi dengan cara:
 - Pelatihan untuk tingkatan Pimpinan (struktural) dan Inspektorat (Pengawasan Internal) untuk mengidentifikasi dan mengatasi korupsi hingga menghindari penyalahgunaan wewenang. Optimalisasi peran atasan dikombinasikan dengan pengawasan internal dan eksternal mampu menekan frekuensi kejadian korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang muncul.
 - Mendorong SPI dilakukan secara berkala.

Rekomendasi



Berdasarkan permasalahan yang terjadi, berikut beberapa rekomendasi yang diusulkan kepada K/L/PD terkait:

Penguatan Sistem Antikorupsi melalui

- Peningkatan efektivitas sosialisasi antikorupsi baik oleh internal maupun dari lembaga-lembaga yang bergerak di pencegahan korupsi secara rutin. Sosialisasi berkala untuk meningkatkan kesadaran pegawai dan pengguna layanan menjadi suatu keharusan bagi instansi untuk berbenah.
- Penegakan hukum dan konsistensinya.
- Penguatan *whistleblowing system* untuk meningkatkan partisipasi pelapor.
- Perlindungan terhadap pelapor.





Survei
Penilaian
Integritas



<https://www.kpk.go.id>

 KomisiPemberantasanKorupsi

 @official.kpk

 @KPK_RI